



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KEDUA : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Magelang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, agar segera disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g  
pada tanggal 25 Nopember 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



## **BERITA ACARA**

**Nomor : 900 / 477 / 440**

**Nomor : 170 / 867 / 140**

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Pemerintah Daerah Kota Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
PERTAMA

2. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang

3. H. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK  
KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian RAPBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2020 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 25 November 2019

**PIHAK PERTAMA**

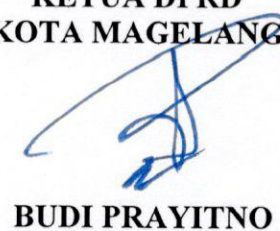
**WALIKOTA MAGELANG**



Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT

**PIHAK KEDUA**

**KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**



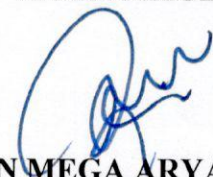
**BUDI PRAYITNO**

**WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**



**H. BUSTANUL ARIFIN, ST**

**WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**



**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**

Lampiran  
Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
Tentang  
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang  
Tahun Anggaran 2020  
Nomor : 900 / 477 / 440  
Nomor : 170 / 857 / 140  
Tanggal : 2019

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020**

| Nomor Urut   | URAIAN                                                                      | Jumlah                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1            | 2                                                                           | 3                       |
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                    | <b>920.712.158.000</b>  |
| <b>01.01</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                                               | <b>255.038.220.000</b>  |
| 1.1.1        | Pajak Daerah                                                                | 36.159.000.000          |
| 1.1.2        | Retribusi Daerah                                                            | 5.302.629.000           |
| 1.1.3        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                           | 9.982.607.000           |
| 1.1.4        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                   | 203.593.984.000         |
| <b>1.2</b>   | <b>Dana Perimbangan</b>                                                     | <b>564.141.925.000</b>  |
| 1.2.1        | Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak                              | 23.861.159.000          |
| 1.2.2        | Dana Alokasi Umum                                                           | 460.404.050.000         |
| 1.2.3        | Dana Alokasi Khusus                                                         | 79.876.716.000          |
| <b>1.3</b>   | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                                 | <b>101.532.013.000</b>  |
| 1.3.1        | Hibah                                                                       | 16.324.000.000          |
| 1.3.2        | Dana Darurat                                                                | 0                       |
| 1.3.3        | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah Lainnya           | 40.043.975.000          |
| 1.3.4        | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                         | 45.164.038.000          |
| 1.3.5        | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya               | 0                       |
| <b>2</b>     | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                       | <b>996.212.158.000</b>  |
| <b>2.1</b>   | <b>Belanja Tidak Langsung</b>                                               | <b>350.828.109.000</b>  |
| 2.1.1        | Belanja Pegawai                                                             | 318.379.205.000         |
| 2.1.2        | Belanja Bunga                                                               | 0                       |
| 2.1.3        | Belanja Subsidi                                                             | 0                       |
| 2.1.4        | Belanja Hibah                                                               | 25.938.141.000          |
| 2.1.5        | Belanja Bantuan Sosial                                                      | 2.554.364.000           |
| 2.1.6        | Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa       | 0                       |
| 2.1.7        | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa | 0                       |
| 2.1.8        | Belanja Tidak Terduga                                                       | 3.956.399.000           |
| <b>2.2</b>   | <b>Belanja Langsung</b>                                                     | <b>645.384.049.000</b>  |
| 2.2.1        | Belanja Pegawai                                                             | 61.180.552.000          |
| 2.2.2        | Belanja Barang dan Jasa                                                     | 413.546.758.000         |
| 2.2.3        | Belanja Modal                                                               | 170.656.739.000         |
|              | <b>Surplus/ (Defisit)</b>                                                   | <b>(75.500.000.000)</b> |
| <b>3</b>     | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                    |                         |
| <b>3.1</b>   | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                                                | <b>86.000.000.000</b>   |
| 3.1.1        | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)           | 86.000.000.000          |
| 3.1.2        | Pencairan dana Cadangan                                                     | 0                       |
| 3.1.3        | Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan                             | 0                       |
| 3.1.4        | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah                              | 0                       |
| 3.1.6        | Penerimaan Piutang daerah                                                   | 0                       |
| 3.1.7        | Penerimaan Dana Bergulir                                                    | 0                       |
| 3.1.8        | Penerimaan Hasil Penarikan                                                  | 0                       |
| <b>3.2</b>   | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                                               | <b>10.500.000.000</b>   |
| 3.2.1        | Pembentukan Dana Cadangan                                                   | 0                       |
| 3.2.2        | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                              | 10.500.000.000          |
| 3.2.3        | Pembayaran Pokok Utang                                                      | 0                       |
| 3.2.4        | Pemberian Pinjaman Daerah                                                   | 0                       |
| 3.2.5        | Pemberian Dana Bergulir                                                     | 0                       |
|              | <b>Pembiayaan Netto</b>                                                     | <b>75.500.000.000</b>   |
| <b>3.3</b>   | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)</b>               | <b>0</b>                |

Magelang, 25 November 2019

**PIHAK PERTAMA**

**WALIKOTA MAGELANG**



**Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT**

**PIHAK KEDUA**

**KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**

A blue ink signature is written over the text 'KETUA DPRD KOTA MAGELANG'.

**BUDI PRAYITNO**

**WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**

A blue ink signature is written over the text 'WAKIL KETUA DPRD KOTA MAGELANG'.

**H. BUSTANUL ARIFIN, ST**

**WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG**

A blue ink signature is written over the text 'WAKIL KETUA DPRD KOTA MAGELANG'.

**DIAN MEGA ARYANI, SE, MM**